

Sandiaga Ingin Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bebas dari Korupsi

JAKARTA (IM) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ingin sektor pariwisata bebas dari praktik korupsi. Sebab itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengagagas pendidikan antikorupsi di Politeknik Pariwisata agar keinginan itu dapat terwujud.

“Program yang akan kami gagas segera yaitu pendidikan antikorupsi di Poltek Pariwisata sebagai bagian dari kultur kita di pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menghadirkan satu sektor yang betul-betul bebas korupsi,” kata Sandiaga, dalam konferensi pers sesuai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/1).

Sandiaga mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut ia meminta pimpinan KPK untuk menjadi narasumber dalam program pendidikan antikorupsi. Ia berharap program pendidikan antikorupsi juga dapat

meningkatkan daya saing serta menciptakan masyarakat yang bersih di dunia pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selain itu, Sandiaga juga meminta pendampingan dari KPK untuk menciptakan budaya melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan gratifikasi di lingkungan Kemenparekraf.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memastikan KPK akan terus mendampingi kerja Kemenparekraf untuk mencegah praktik korupsi. Pendampingan KPK salah satunya program bantuan Kemenparekraf kepada masyarakat sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19 agar tepat sasaran.

“Kita tetap akan memberikan pendampingan, pendampingan dalam arti hal yang bisa menghindari menteri dan semua jajarannya dari hal-hal tidak diinginkan,” kata Lili. ● han

Jumhur Hidayat Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan Secara Virtual

JAKARTA (IM) - Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat menjalani sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di PN Jakarta Selatan, Kamis (21/1). Sidang digelar secara virtual.

Sidang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Meskipun hadir secara virtual, kondisi Jumhur tampak baik-baik saja dan siap menjalani per-

sidangan tersebut.

Seperti diketahui Jumhur ditangkap polisi atas cuitannya di Twitter tentang penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Pihak Kepolisian mempersangkakan Jumhur Hidayat telah menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU no 1 tahun 1946. ● mei

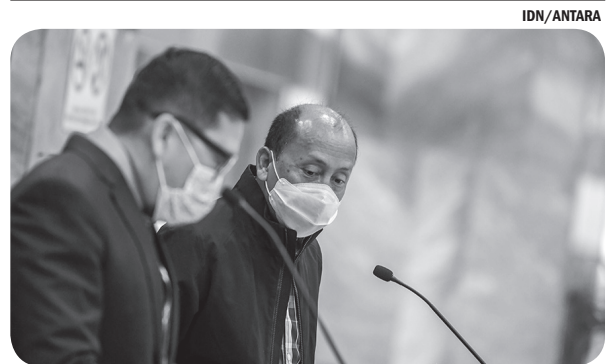
PAW, Irwan Ardi Dilantik sebagai Anggota DPR Pengganti Riza Patria

JAKARTA (IM) - DPR melantik anggota pengganti antarwaktu (PAW) Irwan Ardi Hasman untuk sisa masa jabatan 2019-2024, dalam Rapat Paripurna, Kamis (21/1). Irwan berasal dari Fraksi Partai Gerindra menggantikan Ahmad Riza Patria.

“Irwan Ardi Hasman dari Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Jawa Barat III, menggantikan Ahmad Riza Patria,” kata Ketua

DPR Puan Maharani.

Riza diketahui mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR karena terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ia dilantik sebagai Wagub DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada 15 April 2020. Riza mengisi kursi orang nomor dua di DKI Jakarta itu setelah ditinggal oleh Sandiaga Uno pada Agustus 2018. Saat itu Sandiaga maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. ● mei



KOMISI II AKAN GELAR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON OMBUDSMAN

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa (kanan) memberikan keterangan pers terkait penyelenggaraan Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Ombudsman RI di Lobi Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/1). Komisi II DPR RI telah menerima 18 calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 dari Presiden Joko Widodo, selanjutnya Komisi II akan melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang akan dilaksanakan pada 26-27 Januari 2021.

Terkait Suap Pengaturan Proyek, 4 Anggota DPRD Jabar dan Kepala Bapeda Dipanggil KPK

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 4 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk diminta keterangan terkait kasus suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Keempatnya yakni Ade Barkah Surahman, Phinera Wijaya, Cucu Sugyati, dan Imas Noerani. Keempatnya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim (ARM).

“Para saksi diperiksa untuk tersangka ARM,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (21/1).

Selain keempat anggota DPRD Jabar, tim penyidik juga memanggil mantan Kepala Bappeda M Taufiq Budi Santoso dan mantan Kabid Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA) pada Dinas PUPR Indramayu 2017-2020 Kafidun.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Abdul Rozaq Muslim sebagai tersangka kasus dugaan suap

terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2019.

Abdul Rozaq diduga menerima uang suap senilai Rp8,5 miliar dari seorang pengusaha Carsa AS. Uang itu disinyalir sebagai upaya untuk memuluskan tujuan Carsa AS dalam mendapatkan proyek pada Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu.

Atas ulahnya, Abdul Rozaq Muslim disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Indramayu Suspendi (SP), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT), dan Carsa AS (CAS) dari unsur swasta. Empat orang tersebut telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ● han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER MENTERI PUPR DENGAN KOMISI V DPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) bersama Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1). Rapat kerja tersebut membahas program kerja Kementerian PUPR tahun 2021 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020.

DPR Tunggu Realisasi Kinerja 100 Hari Listyo Sigit Prabowo Setelah Jadi Kapolri

Masyarakat Indonesia menantikan realisasi janji dan kinerja Kapolri terpilih Listyo Sigit Prabowo dalam 100 hari kerjanya. Diantaranya, memberikan pelayanan publik secepat memesan makanan cepat saji.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin, mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri setelah melewati uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI dan disetujui rapat Paripurna DPR, Kamis (21/1) siang.

“Semoga Komjen Pol Pak Listyo Sigit Prabowo dapat

amanah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta membawa Polri semakin maju dan profesional,” kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/1).

Azis mengharapkan, di bawah kepemimpinan Listyo Sigit Polri dapat lebih memaksimalkan kordinasi dan komunikasi antar lembaga guna memudahkan dan menyelesaikan berbagai macam pekerjaan rumah dan perma-

salahan yang beragam.

Menurutnya, Polri ke depan dapat lebih bersahabat dengan masyarakat dan selalu hadir di tengah masyarakat tanpa melihat pangkat dan jabatan serta keterbatasan.

Azis menantikan realisasi janji dan kinerja Listyo Sigit dalam 100 hari kerjanya. Seperti misalnya, memberikan pelayanan publik yang cepat, secepat memesan makanan cepat saji.

“Saya apresiasi Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang ingin melayani masyarakat dengan cepat, seperti memesan makanan cepat saji. Tentunya hal ini harus dapat di realisasikan dalam program 100 hari kerjanya sebagai prestasi kedepannya, usai dirinya menjabat sebagai Kapolri,” pungk

Janji Penting Listyo Sigit

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut ada satu janji penting Listyo Sigit sebagai calon Kapolri yang mendapat sambutan meriah dari anggota DPR, namun tidak banyak mendapatkan atensi dari para awak media. Apa itu?

“Salah satu janji calon Kapolri Komjen Listyo Si-

git yg tdk bnyk diberitakan tapi mendapatkan tepukan meriah di Komisi III DPR (20/1) adlh jika ada anggota atau pejabat Polri yg terlibat kejahatan sprt bandar atau pengedar narkoba maka akan dipecat atau dipidanakan” ini penting,” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu melalui akun Twitter @mohmahfudmd, dikutip Kamis (21/1). ● han

18 Calon Anggota Ombudsman akan Fit and Proper Test di DPR

JAKARTA (IM) - Komisi II DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon anggota Ombudsman periode 2021-2026. Uji kelayakan digelar pada 26-27 Januari 2021.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya telah menerima 18 nama calon anggota ombudsman dari pemerintah untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

“Dan pada hari Selasa dan Rabu 26-27 Januari selama dua hari kami akan melakukan fit and proper test terhadap 18 nama,” kata Doli dalam konferensi pers, Kamis (21/1).

Doli mengatakan, sebelum melaksanakan uji kelayakan, pihaknya akan mengundang pemerhati pelayanan publik dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk menerima masukan terkait calon anggota Ombudsman tersebut.

“Kami undang YLKI dan pemerhati pelayanan publik untuk kita dengarkan masukan dan pandangannya terhadap 18 nama ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, setelah dilakukan uji kelayakan, Komisi II akan menggelar rapat internal untuk menetapkan 9 nama anggota Ombudsman dari 18 nama calon yang diserahkan pemerintah. “Insya Allah hari Kamis bisa kita sepakati mungkin (Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi). ● han

Gempa Sulbar, Korban Meninggal Bertambah Menjadi 91 Orang

JAKARTA (IM) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, hingga Kamis (21/1) pukul 08.00 WIB, jumlah korban meninggal akibat gempa bumi magnitude 6,2 di Sulawesi Barat bertambah menjadi 91 jiwa.

“Korban meninggal 91 jiwa, hilang tiga orang, luka berat 253 orang, luka ringan 679 orang, dan luka sedang 240 orang,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (21/1).

Sementara itu, warga yang mengungsi berjumlah 9.910 jiwa, yang tersebar di beberapa titik pengungsian, dengan rincian di Kabupaten Mamuju teridentifikasi sementara lima titik pengungsian, seperti di Jalu dua titik, Stadion Mamuju, Gerbang Kota Mamuju, Tapalang, dan Kantor Bupati.

Sedangkan di Kabupaten Majene, dua titik teridentifikasi, yaitu di SPN Malunda dan Desa Sulet Malunda. Pasca gempa, upaya penanganan darurat masih berlangsung dan Gubernur Sulawesi Barat telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi selama 14 hari, terhitung

dari 15 hingga 28 Januari 2021. Lebih lanjut, dia mengatakan, melihat dampak bencana, masyarakat selalu diimbau untuk tetap waspada dan siaga. Terutama terkait bencana hidrometeorologi dan potensi bahaya lain, yaitu gempa bumi yang dapat terjadi setiap saat, seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, ancaman bahaya lain, yakni pandemi Covid-19 yang masih terus terjadi penularan di tengah masyarakat.

BNPB mengingatkan untuk melakukan persiapan keluarga dalam menghadapi sejumlah potensi bahaya tersebut. Diskusikan di antara keluarga dengan terlebih dahulu mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko di sekitar.

Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi, seperti InaRISK, Info BMKG, Magma Indonesia untuk mengetahui potensi bahaya dan risiko.

Selanjutnya anggota keluarga dapat mendiskusikan upaya konkret yang dapat dilakukan di sekitar tempat tinggal. Setiap keluarga memiliki tingkat risiko yang berbeda, seperti parameter anggota keluarga, topografi di sekitar rumah, kekuatan bangunan, atau tata ruang rumah. ● han



PEMULANGAN PENGUNSI SULBAR KE DAERAH ASAL

Sejumlah pengungsi gempa Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat turun dari pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara saat tiba di Landasan Udara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (21/1). Sebanyak 102 warga pengungsi gempa Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat tersebut di pulangkan ke daerah asal kelahiran mereka yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur.